



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai

Tahun 2023

Jalan Yos Sudarso No.2 Dumai Telepon : (0765) 31280,4300377

Laman : kanimdumai.kemenkumham.go.id Surel : kanimdmi@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Karunia Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kinerja yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai Tahun 2023 dan hubungannya dengan pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya. LKjIP ini mengukur sejauh mana efisiensi dan efektifitas pemanfaatan dana, sumber daya manusia, sarana pendukung lainnya serta nilai capaian *output* dan *outcome* pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai.

Suatu tata pemerintah yang baik membutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai perwujudan penerapan prinsip tersebut Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai telah menerapkan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang bermuara pada Laporan Kinerja sebagai cermin kinerja yang diwujudkan pada satu tahun tertentu. LKjIP ini menyajikan data capaian kinerja yang telah diwujudkan selama Tahun 2023 yang mencatat pencapaian sasaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi disamping juga mencatat beberapa ketidakberhasilan.

Laporan ini telah disusun sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tanggal 03 Januari 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenkumham. Namun demikian, saran dan kritik yang membangun tetap kami harapkan untuk kesempurnaan laporan ini. Kami berharap semoga LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja dimasa mendatang.



Kepala Kantor,

Ricky Rachmawan

NIP 198211012000121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	5
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Aspek Strategis	5
E. Isu Strategis	5
F. Sistematika Laporan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis	12
B. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran.....	15
BAB IV PENUTUP	19
A. Kesimpulan	19
B. Saran.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai adalah kantor instansi pemerintah di Kota Dumai yang melayani kebutuhan masyarakat terkait keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Sebagai kantor pemerintah, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan laporan kinerja instansi pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan berakhirnya tahun anggaran 2023, maka kami susun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai Tahun Anggaran 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai atas penggunaan anggaran di tahun 2023 dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Laporan ini juga merupakan perwujudan kewajiban Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi pada tahun anggaran 2023 yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tanggal 03 Januari 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenkumham. Laporan ini secara sederhana menggambarkan perencanaan kinerja serta akuntabilitas kinerja secara jelas dan detail serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai adalah kantor instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat terkait keimigrasian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diperlukan struktur organisasi agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilakukan secara sistematis dan jelas. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai suatu kerangka yang menunjukkan suatu hubungan diantara pejabat maupun bidang satu dengan lainnya, sehingga jelas kedudukan, wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian dalam suatu kedudukan yang teratur.

Kantor Imigrasi Dumai memperoleh kenaikan kelas dari kelas II menjadi kelas I pada tahun 2022.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Imigrasi dapat dijelaskan fungsi dan tugas masing-masing bagian di Kantor Imigrasi Kelas I Dumai yaitu sebagai berikut:

B.1.1. Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tatausaha dan rumah tangga Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai sub bagian tata usaha.

1. Kepala Urusan Kepegawaian

Melakukan urusan kepegawaian dilingkungan Kantor Imigrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepala Urusan Umum

Melakukan urusan surat menyurat perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Kantor Imigrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kepala Urusan Keuangan

Melakukan urusan keuangan Kantor Imigrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B.1.2. Seksi Lalulintas Dan Izin Tinggal Keimigrasian

Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas-tugas melakukan kegiatan Keimigrasian di lalu lintas Keimigrasian dibagi menjadi dua bagian yaitu:

➤ Kasubsi Lalulintas Keimigrasian

Sub Seksi Lalulintas Keimigrasian mempunyai tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

- a. Melakukan pemberian izin masuk / keluar dan fasilitas keimigrasian.
- b. Melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin kembali

Tugas :

- a. Melakukan urusan perizinan di bidang lintas batas tradisional melalui wilayah perbatasan antara Negara Republik Indonesia dan Negara lain berdasarkan peraturan dan atau perjanjian lintas batas yang berlaku.
- b. Melakukan urusan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat, dan izin kembali sesuai dengan Aplikasi SPRI.

➤ Kasubsi Izin Tinggal Keimigrasian

Seksi Statuskim mempunyai tugas dan fungsi melakukan urusan status keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Statuskim mempunyai fungsi:

1. Melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia.
2. Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraannya.
3. Sub Seksi Penentuan Status Keimigrasian, mempunyai tugas melakukan penyaringan, penelitian, penyelesaian permohonan alih status dan izin tinggal keimigrasian.
4. Sub Seksi penelaahan Keimigrasian, mempunyai tugas melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang dan memberikan surat keterangan orang asing untuk kelengkapan permohonan kewarganegaraan.

B.3 Seksi Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penindakan Keimigrasian terhadap Orang Asing di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas seksi ini mempunyai fungsi :

1. Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perijinan Keimigrasian dan mengadakan Kerjasama antar instansi di bidang Pengawasan Orang Asing.
2. Melakukan Penyidikan dan Penindakan terhadap pelanggaran Keimigrasian.
3. Menyusun, memelihara dan mengamankan daftar pencegahan dan penangkalan.
4. Melakukan penyidikan pelanggaran keimigrasian dalam rangka Projustitia.
5. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian.
6. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam Pengawasan Orang Asing (TIM PORA).
7. Melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap segala permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan.

Seksi Intelijen dan penindakan keimigrasian terdiri dari dua sub seksi yaitu :

- **Sub Seksi Intelijen Keimigrasian**

Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar Instansi tentang Pengawasan Orang Asing.

➤ **Sub Seksi Penindakan Keimigrasian**

Melakukan tugas Penyidikan dan Penindakan, pencegahan dan penangkalan, penampungan sementara dan perawatan orang asing yang belum dapat dipulangkan, pemulangan dan pengusiran terhadap pelanggaran keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

B.4 Seksi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyebaran dan pemantauan informasi serta pengelolaan sarana komunikasi Keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Insarkom mempunyai fungsi :

1. Melakukan pengumpulan, analisis data, evaluasi, penyajian informasi dan penyebarannya untuk penyelidikan Keimigrasian
2. Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumen Keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi.

Seksi Intelijen dan penindakan keimigrasian terdiri dari dua kasubsi yaitu :

1. Kasubsi Teknologi Informasi yaitu melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi mengenai WNI dan WNA dalam rangka kerjasama tukar menukar informasi untuk pengamanan teknis operasional keimigrasian.
2. Kasubsi Teknologi Komunikasi yaitu melakukan pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi keimigrasian serta penggunaan dan pemeliharaan sarana komunikasi.

C. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI TPI Dumai sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - o Urusan Kepegawaian
 - o Urusan Umum;
 - o Urusan Keuangan.
- b. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, membawahi :
 - o Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian;
 - o Sub Seksi Komunikasi Keimigrasian.
- c. Seksi Lalulintas Keimigrasian, membawahi :
 - o Sub Seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan;

- Sub Seksi Pemeriksaan Keimigrasian.
- d. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, membawahi :
 - Sub Seksi Intelijen Keimigrasian;
 - Sub Seksi Penindakan Keimigrasian.
- e. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, membawahi :
 - Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian;
 - Sub Seksi Status Keimigrasian.

Bagan Struktur Organisasi

1. Kepala Kantor imigrasi Kelas I TPI Dumai

2. Kasubag TU

7. Kaur Umum

8. Kaur Kepegawaian

9. Kaur Keuangan

3. Kasi Lalulintas Keimigrasian

10. Kasubsi Pelayanan Dokumen Perjalanan

11. Kasubsi Pemeriksaan Keimigrasian

4. Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

12. Kasubsi Intelijen

13. Kasubsi Penindakan

5. Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

14. Kasubsi Teknologi Informasi

15. Kasubsi Komunikasi

6. Kasi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

16. Kasubsi Izin Tinggal Keimigrasian

17. Kasubsi Status Keimigrasian

Keterangan :

- | | |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Dumai
M.Hum | :Ricky Rachmawan,A.Md.Im,S.H,M.H |
| 2. Kasubag TU | : Soegiyanto, S.H |
| 3. Seksi Lalulintas Keimigrasian | : Boyke Panggabean S.H |
| 4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian | : Dianta Kita Sinuraya,S.E |
| 5. Seksi TIK Keimigrasian | : Parizal Ham, S.H |
| 6. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian | : Parizal Ham, S.H |
| 7. Kaur Umum | : Rasiman Situmorang, S.Kom |
| 8. Kaur Kepegawaian | : Endang Fitriyanti, S.Sos |
| 9. Kaur Keuangan | : Zul Efendi, S.H |
| 10. Kasubsi Pelayanan Dokumen Perjalanan | : Ismed Ade Winata, Amd.IM, S.H |
| 11. Kasubsi Pemeriksaan Keimigrasian | : Wahyu Aditya Prabu, S.H |
| 12. Kasubsi Intelijen Keimigrasian | : Ryanda Pratama,S.H |
| 13. Kasubsi Penindakan Keimigrasian | : Totok Purnawan, S.H |
| 14. Kasubsi Teknologi Informasi | : Al Asari, S.H |
| 15. Kasubsi Komunikasi | : Feny Jendry Luis S.H |
| 16. Kasubsi Izin Tinggal | : Eko Santoso S.H |
| 17. Kasubsi Status Keimigrasian | KOSONG |

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai Tahun Anggaran 2023 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

- Sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai selama tahun anggaran 2023.
- Sebagai bahan informasi untuk mengevaluasi kinerja di tahun 2023 dan menyiapkan langkah di tahun mendatang.

D. Aspek Strategis

Keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai menjadi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia karena beberapa aspek. Adapun beberapa aspek tersebut yaitu:

- Penegakan Hukum Keimigrasian
- Keamanan Negara
- Pelayanan Keimigrasian
- Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat
- Dukungan Manajemen

E. Isu Strategis

Isu strategis merupakan merupakan beberapa poin yang dapat menghambat kinerja organisasi. Adapun beberapa isu strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai adalah :

- Kurangnya SDM untuk melakukan kinerja secara optimal
- Peningkatan kelas membutuhkan sarana prasarana penunjang
- Ketiadaan Gudang BMN
- Kurangnya pegawai yang bersertifikat untuk pengadaan barang dan jasa

F. Sistematika Laporan

Laporan ini terdiri dari 4 (empat) Bab yang secara sederhana berisikan materi sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan :
 - Latar Belakang
 - Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
 - Maksud dan Tujuan
 - Aspek Strategis
 - Sistematika Laporan
- b. Bab II Perencanaan Kinerja
 - Rencana Strategis
 - Perjanjian Kinerja
- c. Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - Capaian Kinerja Organisasi

- Realisasi Anggaran
 - Capaian Kinerja Anggaran
 - Capaian Kinerja Lainnya
- d. Bab IV Penutup
- Simpulan
 - Saran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Bidang	Arah Kebijakan	Strategi
Penegakan Hukum Keimigrasian	Penegakan hukum keimigrasian berbasis teknologi informasi dan komunikasi.	Dengan kewenangan pejabat imigrasi sebagai PPNS yang mandiri dan didukung oleh integrasi SIMKIM dengan sistem informasi manajemen Kementerian/ lembaga lainnya, Direktorat Jenderal Imigrasi mewujudkan kepastiaan penegakan hukum keimigrasian.
Keamanan negara	Mengoptimalkan jumlah dan kompetensi SDM intelijen dan pengawasan keimigrasian berbasis teknologi informasi dan komunikasi.	Mengoptimalkan jumlah dan kompetensi SDM yang ada di bidang intelijen dan pengawasan keimigrasian untuk menanggulangi semakin beragam dan canggihnya tindak pidana keimigrasian.
Pelayanan Keimigrasian	Peningkatan kualitas produk dan pelayanan keimigrasian berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan mendekatkan kepada masyarakat	Pengelolaan anggaran dilakukan secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan pemanfaatan sistem pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi & komunikasi untuk mewujudkan kepastiaan pelayanan keimigrasian.
Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat	Peraturan perundang-undangan/ kebijakan keimigrasian yang mendukung kegiatan perdagangan, investasi, bisnis dan wisata berskala internasional di wilayah Indonesia.	Mengembangkan kebijakan keimigrasian dalam kegiatan perdagangan, investasi, bisnis dan wisata berskala internasional di wilayah Indonesia yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat
Dukungan Manajemen	Optimalisasi dukungan manajemen dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian	Mendorong optimalisasi dukungan manajemen dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian melalui pemanfaatan anggaran dan SDM

B. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kantor Imigrasi Dumai membuat perjanjian kinerja dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Riau pada 04 Januari 2023 yang berisikan sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI DUMAI DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,25 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 Indeks
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 Indeks
3.	Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan kementetrian hukum dan HAM dengan	Layanan tata Kelola pemerintah yang efektif dan efisien di lingkungan Ditjen Imigrasi	1 layanan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 Indeks 3,13 Indeks
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.379.815.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.379.815.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.004.076.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 6.004.076.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,25	3,21
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13	3,09

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realiasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25	3,24
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13	3,10

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25	3,24
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13	3,11
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13	3,11

Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.379.815.000,- (Pagu Awal) Rp. 1.619.535.000,- (Pagu Revisi)	Rp. 1.618.759.740,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.379.815.000,- (Pagu Awal) Rp. 1.619.535.000,- (Pagu Revisi)	Rp. 1.618.759.740,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.004.076.000,- (Pagu Awal) Rp. 7.486.176.000,- (Pagu Revisi)	Rp. 7.484.008.231,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 6.004.076.000,- (Pagu Awal) Rp. 7.486.176.000,- (Pagu Revisi)	Rp. 7.484.008.231,-

B. Realisasi Anggaran

Penyerapan Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 9.102.873.933,- (sembilan milyar serratus dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) atau sebesar 99,97%.

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian			
1. Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI	Rp. 635.341.000,-	Rp. 635.188.678,-	99,98%
2. Layanan Penerbitan Izin Tinggal	Rp. 72.872.000,-	Rp. 72.699.129,-	99,76%
Operasi Bidang Keamanan			
1. Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah	Rp. 313.110.000,-	Rp. 313,107,000,-	100%
2. Operasi Mandiri di Wilayah	Rp. 84.298.000,-	Rp. 84.297.000,-	100%
3. Operasi Gabungan di Wilayah	Rp. 92.572.000,-	Rp. 92.569.000,-	100%
4. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	Rp. 20,000,-	0	0.0%
Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat			
1. Tindakan Administratif Keimigrasian	Rp. 232.316.000,-	Rp. 231.922.636,-	99.83%
2. Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	Rp. 107.416.000,-	Rp. 107.413.297,-	100%
Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat			
1. Pengawasan Orang Asing	Rp. 81.590.000,-	Rp. 81.563.000,-	99.97%
Layanan Dukungan Manajemen Internal			
1. Layanan BMN	Rp. 34.388.000,-	Rp. 34.374.012,-	99.96%
2. Layanan Umum	Rp. 175.296.000,-	Rp. 175.284.572,-	99.99%
3. Layanan Data dan Informasi	Rp. 476.416.000	Rp. 476.395.635,-	100%
4. Layanan Perkantoran	Rp. 5.028.846.000,-	Rp.5.027.013.281,-	99.96%

Layanan Sarana dan Prasarana Internal			
1. Layanan Sarana Internal	Rp. 1.439.070.000,-	Rp.1.438.828.480,-	99.98%
Layanan Manajemen SDM Internal			
1. Layanan Manajemen SDM	Rp. 128.160.000,-	Rp. 128.148.387,-	99.99%
Layanan Manajemen Kinerja Internal			
1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 70.675.000,-	Rp. 70.662.140,-	99.98%
2. Layanan Manajemen Keuangan	Rp.62.853.000,-	Rp. 62.843.196,-	99.98%
3. Layanan Reformasi Kinerja	Rp. 70.472.000,-	Rp. 70.458.528,-	99.98%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai Tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan realiasi anggaran mencapai 99,97% pada akhir Desember 2023. Namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan dan dipertahankan guna memberikan layanan prima bagi masyarakat di Kota Dumai.

Dan pada saat ini Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai telah melaksanakan visi, misi serta fungsinya tepat pada sasaran. Kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dapat diberikan tepat waktu dan sasaran. Kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dapat diberikan tepat waktu dan sasaran. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai juga telah membuat program kerja, kalender dan disbursement plan tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 yang berhubungan dengan kepegawaian dan tata usaha keuangan serta perlengkapan telah dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Dalam hal pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai telah dapat meningkatkan kinerja pelayanannya, hal ini tercermin dari pelaksanaan pelayanan DPRI dan Izin Tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai terselesaikan dengan tepat waktu. Kantor Imigrasi dengan layanan terbaiknya yaitu Layanan Aplikasi Pasporku, Layanan Larisa (Layanan Pengambilan Paspor di hari Sabtu), Layanan Papadila (Layanan Pengantaran Paspor Bagi Difabel dan Lansia), Layanan berbasis HAM, telah disediakan ruang bermain anak dan telah disediakan Pos Layanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas), Inovasi Layanan seperti Layanan Pak Gambus (Siaga Memberi Layanan Khusus), Layanan Pantun (Pelayanan Tanpa Tunda), Layanan Drive Thru untuk kepentingan pelayanan publik yang prima dan Pasti.

B. Saran

Guna mendukung semakin baiknya pelayanan dan kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai dimana dengan banyaknya inovasi yang dibuat maka peran Sumber Daya Manusia sangat dibutuhkan dengan keterbatasan jumlah pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, sehingga diperlukannya penambahan SDM agar semua inovasi layanan dapat berjalan dengan optimal.